



Jakarta, 10 Oktober 2025

AMKRI: “Pak Menteri, Setelah Kunjungi Pabrik Rokok, Beranikah Anda Kunjungi Bangsal Pasien Korban Rokok?”

Aliansi yang beranggotakan para pasien dan keluarga pasien dengan penyakit akibat rokok yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI). Dengan dasar kepedulian dan keprihatinan terhadap masyarakat yang sudah menjadi korban dari dampak bahaya rokok, maka kami tidak ingin generasi Indonesia menjadi korban baru yang dirampas kesehatan dan masa depannya.

Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI) menyatakan **kekecewaan mendalam** atas sikap Menteri Keuangan yang memilih untuk **tidak menaikkan cukai rokok** dan bahkan melakukan **kunjungan ke industri rokok**. Keputusan ini dinilai sebagai bentuk **ketidakpekaan terhadap penderitaan jutaan masyarakat yang menjadi korban produk mematikan tersebut**.

Ketua AMKRI, **Helena Liswardi**, menegaskan bahwa langkah Menteri Keuangan tersebut menunjukkan keberpihakan yang keliru.

“Kami para korban rokok ingin bertanya, setelah melihat industri rokok dan keuntungan besar para pengusaha tembakau, apakah Pak Menteri juga berani mengunjungi **bangsal-bangsal rumah sakit** yang penuh oleh pasien kanker paru, penyakit jantung, dan stroke akibat rokok?” tegas Helena.

Menurut AMKRI, keputusan tidak menaikkan cukai rokok berarti **mengabaikan tanggung jawab moral dan ekonomi negara** terhadap rakyatnya. Padahal, **biaya kesehatan akibat rokok jauh lebih besar dibandingkan penerimaan negara dari cukai**. Data Beban biaya kesehatan di Indonesia membengkak karena penyakit akibat rokok mencapai Rp27,7 T pada 2019, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya pada 2015 (CISDI, 2021), yang berkontribusi pada defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp17 T(2019), dengan total kerugian makro 410 triliun rupiah alias dua kali pendapatan dari cukainya.

kesaksian dari salah satu korban rokok yang tergabung dalam AMKRI bapak Daniel Baten ,

“Sejak tahun 2012 saya mulai merasakan gejala yang mengkhawatirkan: Puncaknya terjadi di usia 47 tahun, ketika saya harus menjalani operasi pengangkatan laring. Operasi itu merenggut suara normal saya dan membuat hidup saya dipenuhi tantangan baru. Saya tahu betul rasanya menjadi korban rokok; ini bukan hanya tentang kerugian finansial, tapi juga kehilangan kualitas hidup secara permanen.”

AMKRI juga menyoroti bahwa kunjungan ke industri rokok tidak boleh dijadikan legitimasi untuk melindungi kepentingan bisnis di atas kepentingan kesehatan publik.

“Hidup pasca operasi laring jauh dari kata mudah. Lubang di leher yang tersisa menuntut perhatian ekstra; sedikit saja udara dingin menyerang, saya pasti langsung batuk atau flu. Lebih penting lagi, saya harus selalu waspada agar udara kotor tidak sedikit pun kemasukan ke lubang pernapasan pasca operasi, sebuah kesulitan yang mengubah cara saya berinteraksi dengan dunia luar.”

“Kami, para korban rokok yang tergabung dalam AMKRI, bertanya kepada Pak Menteri Keuangan: Ketika Anda memilih untuk tidak menaikkan cukai rokok dan bahkan mengunjungi pabriknya, apakah Anda benar-benar memahami penderitaan kami? Apakah Anda berani menengok kami di bangsal rumah sakit dan merasakan langsung beban fisik serta kesulitan harian yang kami hadapi akibat produk mematikan ini? Kesehatan dan masa depan jutaan rakyat tak ternilai harganya, jauh melampaui keuntungan industri rokok.” ujar Daniel.

Seruan AMKRI:

1. Pemerintah harus **meninjau ulang keputusan tidak menaikkan cukai rokok**, dan segera **menetapkan kenaikan signifikan** sesuai dengan rekomendasi kesehatan publik.
2. Kementerian Keuangan dan kementerian terkait **harus berpihak pada korban, bukan pada industri yang menyebabkan penyakit.**
3. Masyarakat sipil dan media diimbau untuk terus **mengawal transparansi dan keberpihakan kebijakan fiskal terhadap kesehatan rakyat.**

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok bukan hanya kebijakan yang keliru, tetapi juga ancaman nyata bagi masa depan kesehatan bangsa. Ketika industri rokok dilindungi, rakyatlah yang menjadi korban: jatuh sakit, semakin miskin, dan meninggal lebih cepat. Organisasi kesehatan, akademisi, dan aktivis anak menegaskan kembali bahwa **pemerintah seharusnya berpihak pada rakyat, bukan pada industri perusak.**

